

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrahman. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, (Bandung: Alumni, 1995)

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ali Achmad Chomzah. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, (Bandung: Alumni, 2002)

Arie Sukanti Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah* (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005)

Bernhard Limbong, *Politik Hukum Pertanahan*, (Jakarta; Margaretha Pustaka, 2014)

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid I*, (Jakarta: Djambatan, 1999)

Cholid Narbuko, et.al, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Dan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, (Karawaci: Fakultas Hukum UPH, 2022)

Fataturun, *Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*, (Kalijaga: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)

Hendra Nurtjahjo, *et.al, Memahami Maladministrasi*. (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013)

Isnaini, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Medan: Pustaka Prima, 2022)

Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, 2003)

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: West Thomson Learning, 2004)

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964)

Maria S.W Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008)

Maria S.W. Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas, 2008)

Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Soimin, *Hak dan Pengadaan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Tampil Anshari Siregar, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, (Medan: FH. USU, 2011)

Urip Santoso, *HUKUM AGRARIA: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)

## **JURNAL**

Azhar Ravif, "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pertanahan Dalam Program PTSL Di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo (Studi Sengketa Antara Shm No.1 Dengan Shm No. 1351/Desa Wonokerto)", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol 07, No.10, September 2023

Eman Ramelan, "Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999", *Majalah YURIDIKA*, Vol. 15 No. 3, Mei-Juni 2000

Fani Martiawan Kumara Putra, "Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26, no. 2, 2017

Isdiana Syafitri, “Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024

Iskandar Mudakir, “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 4 No. 2, 2014

Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Yustisia*, Vol 05, No.02, Agustus 2016, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>

John Tomi Siska, “Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7, no. 2, 2021

Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Desember 2014

Muslimah Hayati, “Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol 9. No.1, Februari 2021

Noviasih Muharam, “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah,” *Pranata Hukum*, Vol 10, no. 1, 2015

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak  
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan  
Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun  
1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan  
Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Negara Nomor 9  
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah  
Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah

### **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn

### **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Ibu Notaris/PPAT Reny Handayani Asyhari, S.H., M.Kn.,  
selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Jembrana, Bali, pada hari Senin, 28 Oktober  
2024 pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Mas Putra Zenno J, S.H., M.H., selaku lawyer dan  
salah satu pemimpin MAS Lawfirm di Bandung, pada hari Rabu, 6 November  
2024 pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H., selaku anggota  
lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, pada hari Jumat, 30  
November 2024 pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Sigit Tirto Utomo, S.H. dari Keasistenan Utama IV lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, pada hari Jumat, 30 November 2024 pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Dessy Ratnasari, S.H. dari Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, pada hari Jumat, 30 November 2024 pukul 15.00 WIB.

